

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Pekalongan

Halaman 10

Piutang Pajak Puluhan Miliar

KAJEN – Pengelolaan pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pekalongan rupanya kurang maksimal. Sesuai data piutang PBB di Kota Santri mencapai Rp 10,7 M yang tersebar di 16 kecamatan dan 261 desa/kelurahan dengan jumlah sekitar 150 ribu objek pajak (OP). Pemkab pun berusaha mengatasi masalah ini.

“Kami coba lakukan inovasi sistem tracking atau penelusuran yang akan di uji-cobakan di dua kecamatan. Yakni di Kecamatan Doro dan Kecamatan Sragi, ada 21 desa sebagai pilot project,” kata Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Wiryanto Santoso saat Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Tracking untuk Menyelesaikan Masalah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Aula Setda, Kemarin.

Sosialisasi ini diharapkan memotivasi semua pihak untuk menyelesaikan piutang PBB. Sehingga meningkat-

kan pendapatan asli daerah dengan intensifikasi penagihan pajak PBB. Sekarang ada pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam hal pengelolaan PBB, membawa beberapa persoalan kaitannya dengan piutang.

Sementara, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menuturkan, seiring desentralisasi fiskal, setiap daerah menghadapi persoalan PBB. Di

antaranya masalah database dan piutang. “Sistem tracking ini dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari PBB. Saya harapkan tiap OPD juga berinovasi dan menciptakan birokrasi yang berjiwa enterpreuner, memajukan kesejahteraan masyarakat,” pinta Bupati. Dengan sistem tracking, diharapkan bisa menyelesaikan piutang PBB sekaligus menata database. (yan/dik)